

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, PENDIDIKAN DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI BALI

Agus Pande Darmawan<sup>1</sup>  
I Wayan Wenagama<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
e-mail: aguztpande999@gmail.com / telp: +62 8193616386

### ABSTRAK

Kemiskinan merupakan kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang di alami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara serempak dan parsial PAD, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, yang disertai dengan uji asumsi klasik. Hasil uji memperoleh hasil PAD, pendidikan, dan pengangguran berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Secara parsial PAD dan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Sementara itu, secara parsial pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah, pendidikan, pengangguran, kemiskinan

### ABSTRACT

*Poverty is a condition of life for underprivileged are in a natural person or household that can not meet the minimum requirements or eligible for life This study aims to determine the effect simultaneously and partially PAD, education, unemployment and poverty in the province of Bali. The data used in this research is secondary data. Data collection method used in this research is the case study method. The analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis, which is accompanied with the classical assumption. PAD results obtained test results, education, and unemployment simultaneously significant effect on poverty in the province of Bali. Partially PAD and significant negative effect of education on poverty in the province of Bali. Meanwhile, in partial unemployment positive and significant impact on poverty in the province of Bali.*

**Keywords:** PAD, education, unemployment, poverty

## PENDAHULUAN

Fenomena kemiskinan merupakan salah satu penyakit ekonomi makro yang dihadapi oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia (Sri Budhi, 2013). Adanya ketimpangan distribusi kemakmuran yang ada saat ini perpektif atau cara

pandang mengenai kemiskinan itu sendiri akan sangat berbeda satu dengan yang lain. Negara miskin yang secara langsung menghadapi masalah kronis ini akan memandang kemiskinan sebagai benih pesimis jangka panjang yang tidak mungkin di hapuskan dalam beberapa generasi. Negara-negara berkembang yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik akan memandang kemiskinan sebagai bibit ketidak bahagiaan yang memiliki potensi menjadi polemik kompleks untuk masalah sosial dalam negeri mereka. Sementara itu bagi kelompok negara maju, negara miskin adalah pasar yang potensial yang belum digarap. Sebuah wilayah dengan potensi sumber daya alam terpendam dan kekuatan ekonomi yang luar biasa akan menjadi bangsa yang kuat jika digarap dengan sempurna (BAPPEDA Provinsi Bali, 2014).

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi fokus perhatian pemerintah Indonesia. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah telah menekan jumlah penduduk miskin setiap tahunnya. Namun demikian, berbagai program tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi target pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan (Dariwardani, 2014). Lebih lanjut Suhartini (2014), pengentasan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama dalam pembangunan di Indonesia, bahkan menjadi tujuan pertama dalam pembangunan milenium (*Millenium Development Goals*) dengan mengurangi separuh kemiskinan SDGD pada tahun 2015. Bali yang dikenal sebagai destinasi pariwisata juga tak luput dari permasalahan kemiskinan penduduk (BPS Provinsi Bali, 2015).

Guna mengatasi permasalahan kemiskinan diperlukannya pertumbuhan ekonomi berkualitas. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan, salah satu upaya yang efektif yaitu dengan memperbaiki pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya (Silva dan Sumarto, 2014). Pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dengan investasi. Investasi akan memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih bermanfaat kepada kaum miskin (Yusuf dan Summer, 2015). Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan "buatan" terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, sehingga mereka tetap miskin. Maka itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan yang melulu terfokus pada pertumbuhan dari pada pemerataan.

Menurut Djojohadikusumo (1995) pola kemiskinan ada empat yaitu, Pertama adalah *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Kondisi kesehatan bagi masyarakat miskin pada umumnya tidak begitu baik ataupun buruk, dan banyak dari mereka yang buta huruf, serta menganggur (Suputra, 2016). Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang kompleks dan sudah berakar pada berbagai sektor dan kondisi (Panji, 2016). Bagi masyarakat miskin, pemenuhan hak dasar atas pekerja yang layak ditentukan dari ketersediaan lapangan kerja yang dapat diakses, kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha, serta melindungi pekerja dari eksploitasi dan ketidakpastian kerja. Masyarakat miskin umumnya memiliki masalah dalam mendapatkan kesempatan kerja dan usaha, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan (Astrini, 2013). Upaya perluasan kesempatan kerja dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja sehingga tingkat kemiskinan akan menurun (Ashcroft dan David, 2008).

Kemiskinan merupakan kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang di alami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Ritonga 2003:1). Provinsi Bali yang sudah di kenal sebagai ikon pariwisata juga belum lepas dari masalah kemiskinan. Data Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Menurut Klasifikasi Daerah Tahun 2001-2015 disajikan di Tabel 1.

**Tabel 1 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Menurut Klasifikasi Daerah Tahun 2001-2015**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)		
	Kota	Desa	Kota+Desa
2001	67,1	181,3	248,4
2002	98,9	122,9	221,8
2003	99,7	146,4	246,1
2004	87,0	144,9	231,9
2005	105,9	122,5	228,4
2006	127,4	116,0	243,5
2007	119,8	109,3	229,1
2008	115,1	100,6	215,7
2009	92,1	89,7	181,7
2010	83,6	91,3	174,9
2011	100,3	81,8	182,1
2012	92,1	66,9	159,0
2013	103,03	79,74	182,77
2014	109,20	86,76	195,95
2015	115,80	102,99	218,79

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Provinsi Bali, 2015

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali menurut klasifikasi daerah tahun 2001-2015 terus mengalami kenaikan dan penurunan, dimana jumlah penduduk miskin di kota dan desa terbesar terdapat pada tahun 2001 sebesar 248,4 ribu jiwa sedangkan jumlah penduduk miskin terbesar di kota terdapat pada tahun 2006 sebesar 127,4 ribu jiwa dan jumlah penduduk miskin terbesar di desa terdapat pada tahun 2001 sebesar 181,3 ribu jiwa. Strategi yang di lakukan pemerintah Provinsi Bali untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut dengan cara melakukan program-program yang bersifat pro rakyat dan memberikan sekolah gratis di desa-desa bagi penduduk yang belum mampu. Jika pemerintah mampu mengelolah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing daerah yang ada di Provinsi Bali maka akan bisa memperkecil angka kemiskian tersebut.

PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak di pisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah (Nehen 2016:410). PAD yang di terima pemerintah daerah menggambarkan tingkat kesiapan daerah-daerah mengelola daerahnya (Wijayanti, 2015). Semakin tinggi PAD maka semakin besar anggaran belanja terutama dalam pengalokasian belanja untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu indikator kemiskinan, semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah maka semakin rendah tingkat kemiskinan masyarakat. Menurut Santosa (2013) menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan. Semakin baik daerah mengelola potensi daerahnya maka semakin tinggi pendapatan yang di terima sehingga daerah tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada.

Provinsi Bali merupakan daerah dengan PAD yang cukup tinggi ini di karenakan daerah di Provinsi Bali merupakan daerah pariwisata. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan biasa untuk mensejahterakan masyarakat khususnya di Provinsi Bali. Tabel 2 menunjukkan bahwa dari tahun 2001 sampai tahun 2003 PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Provinsi Bali mengalami penurunan menjadi Rp 419,000,108,00,- pada tahun 2004 PAD (Pendapatan Asli Daerah) Provinsi Bali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 584,389,190,00,- dan terus mengalami kenaikan sampai tahun 2015 sebesar Rp 4,889,103,312,00,-.

**Tabel 2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali Tahun 2001-2015**

Tahun	PAD (Pendapatan Asli Daerah) (Rp Ribu)
2001	563.321.088
2002	558.882.483
2003	419.000.108
2004	584.389.190
2005	591.965.844
2006	700.441.509
2007	882.607.711
2008	968.637.072
2009	1.462.727.820
2010	1.883.737.106
2011	2.491.327.748
2012	3.234.837.395
2013	4.033.937.195
2014	4.842.700.556
2015	4.889.103.312

*Sumber:* Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 1999/2000-2000.2003-2004 BPS Provinsi Bali

Pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi kemiskinan karena semakin tinggi pendidikan seseorang akan mampu mendapatkan pekerjaan yang layak dan dapat menambah pendapatan seseorang. Semakin tinggi pendidikan seseorang akan mendorong produktivitas kerja dan pengalaman akan semakin meningkat, sangat berbeda dengan seseorang yang tidak memiliki pendidikan atau putus sekolah. Pendidikan juga harus mendapatkan sorotan dari pemerintah agar masyarakat bisa mengejar sosial ekonominya dan meningkatkan SDM masyarakat tersebut. Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap kemiskinan karena pendidikan merupakan salah satu komponen yang terkait dalam penyebab kemiskinan (Iswara, 2014).

Menurut Mankiw (2012) pendidikan adalah investasi dalam modal manusia setidaknya sama pentingnya dengan investasi dalam modal fisik untuk mencapai kesuksesan ekonomi jangka panjang suatu Negara. Investasi dalam

modal manusia, sama seperti investasi dalam modal fisik, mempunyai biaya kesempatan. Pendidikan merupakan investasi yang dapat menunjang kesuksesan ekonomi pada suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan menunjang tingkat kemakmuran masyarakat dan akan dapat menekan angka kemiskinan. Pendidikan secara luas diakui sebagai proses untuk pengentasan kemiskinan (Aref, 2011)

Menurut Rahmawati (2006), kondisi kemiskinan dapat juga di sebabkan karena pendidikan yang rendah. Dimana taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang. Menurut Janjua (2011), pendidikan selalu dianggap sebagai alat yang dominan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan melalui peningkatan produktivitas, yang juga merupakan faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Todaro (1994) menyatakan bahwa selama beberapa tahun, sebagian besar penelitian dibidang ilmu ekonomi, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara sedang berkembang, menitik beratkan pada keterkaitan antara pendidikan, produktifitas tenaga kerja, dan tingkat output. Hal ini tidak mengherankan karena sasaran utama pembangunan di tahun 1950-an dan 1960-an adalah mamaksimumkan tingkat pertumbuhan output total. Akibatnya, dampak pendidikan atas distribusi pendapatan dan usaha menghilangkan kemiskinan absolut sebagian besar telah dilupakan. Selanjutnya Todaro (2000) menyatakan

bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Yang mana pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Simmons (dikutip dari Todaro, 1994), pendidikan di banyak negara merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Dimana digambarkan dengan seorang miskin yang mengharapkan pekerjaan baik serta penghasilan yang tinggi maka harus mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh dalam mengatasi masalah kemiskinan. Dalam penelitian Hermanto dan Dwi (2006) dihasilkan bahwa pendidikan mempunyai pengaruh paling tinggi terhadap kemiskinan dibandingkan variabel pembangunan lain seperti jumlah penduduk, PDRB, dan tingkat inflasi.

Banyak yang beranggapan bahwa bangsa yang mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas akan lebih mampu bersaing dalam memasarkan barang dan jasa yang dihasilkannya, sehingga dengan sendirinya akan menguasai perekonomian dunia. Dalam kaitan ini, salah satu komponen yang berkaitan langsung dengan peningkatan langsung dengan peningkatan SDM selalu diupayakan untuk ditingkatkan melalui pendidikan yang berkualitas, demi tercapainya keberhasilan pembangunan. Peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan investasi modal manusia berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan (Pervez, 2014).

Pembangunan SDM memiliki keterkaitan erat dengan akses penyediaan fasilitas pendidikan meliputi gedung sekolah, tenaga pengajar, kelengkapan

literatur, dan sarana penunjang pendidikan lainnya. Segala bentuk upaya peningkatan pendidikan selalu terganjal dengan beragam kendala seperti kurangnya biaya pendidikan, kurangnya tenaga pengajar di daerah pedesaan, kurangnya keinginan masyarakat untuk mengejar pendidikan. (BPS Provinsi Bali, 2015). Keadaan gambaran pendidikan di Provinsi Bali akan dilihat secara khusus melalui beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian ini yakni kemampuan baca dan tulis penduduk (Angka Melek Huruf).

**Tabel 3 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas di Provinsi Bali Tahun 2001-2015**

Tahun	Angka Melek Huruf (%)
2001	81,05
2002	85,64
2003	84,44
2004	85,52
2005	86,22
2006	85,79
2007	85,98
2008	86,94
2009	87,22
2010	88,40
2011	89,17
2012	90,17
2013	91,03
2014	92,56
2015	92,77

*Sumber:* BPS Provinsi Bali, 2015

Tabel 3 menunjukkan bahwa Angka Melek Huruf penduduk usia 15 tahun keatas tahun 2015 mencapai 92,77 persen, banyak mengalami peningkatan dari tahun 2001 yang hanya 81,05 persen. Pendidikan yang diukur dari angka melek huruf berpengaruh besar terhadap menurunnya tingkat kemiskinan. Hal tersebut dapat dikatakan pembangunan melalui pendidikan dapat menekan angka kemiskinan. Selanjutnya penyebab kemiskinan adalah Tingkat Pengangguran, Pengangguran itu sendiri dapat disebabkan oleh banyak sekali faktor sosial

diantaranya para pekerja yang menjadi korban PHK perusahaan-perusahaan atau pabrik yang menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan.

Menurut Sileika (2013) mengatakan bahwa pengangguran secara langsung dipengaruhi oleh kemiskinan. Kemiskinan dan pengangguran adalah masalah terbesar yang dihadapi sebagian besar negara di dunia saat ini, apakah mereka Negara maju atau berkembang. Mereka hambatan untuk kemajuan sosial, dan menyebabkan pemborosan sumber daya manusia dan material (Akwara, 2013).

Menurut Tambunan (2001), Pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara yaitu jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka bencana pengangguran akan secara langsung mempengaruhi *income poverty rate* dengan *consumption poverty rate*. Jika rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.

Hubungan antara pengangguran dengan tingkat kemiskinan juga didukung oleh teori lingkaran setan kemiskinan versi nurkse yang menggambarkan rendahnya produktivitas sebagai salah satu penyebab kemiskinan. Pengangguran bisa diartikan sebagai rendahnya produktivitas seseorang. Hal itu dikarenakan penganggur tidak melakukan pekerjaan apapun untuk menghasilkan upah yang nantinya digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin banyak pengangguran maka akan menyebabkan tingkat kemiskinan terus bertambah.

Pengangguran juga bisa di sebabkan dari seseorang yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan karena latar belakang pendidikan yang hanya sampai SD/SMP/SMA atau putus sekolah.

**Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali Tahun 2001-2015**

Tahun	Tingkat pengangguran terbuka (persen)
2001	3,82
2002	3,51
2003	7,59
2004	4,66
2005	5,32
2006	6,04
2007	3,77
2008	3,31
2009	3,13
2010	3,06
2011	2,95
2012	2,10
2013	1,79
2014	1,90
2015	1,99

*Sumber:* Badan Pusat Statistik, 2016

Pada Tabel 4 akan menunjukkan masalah tingka pengangguran terbuka yang ada di Provinsi Bali tahun 2001-2015. Tabel 4 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali Tahun 2001-2015 mengalami ketidak tetapan atau guncangan dari tahun 2001-2015, hal ini dikarenakan pada tahun 2003 tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali paling besar yaitu sebesar 7,59 persen. Ini dikarenakan pada tahun 2002 terjadi tragedi BOM Bali 1 yang menyebabkan terjadinya tingkat pengangguran paling tinggi di tahun 2003. Sedangkan tingkat pengangguran paling kecil terjadi pada tahun 2015 sebesar 1,99 persen.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendidikan, dan pengangguran secara simultan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali, 2) untuk

mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendidikan dan pengangguran secara parsial terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh PAD, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Lokasi penelitian ini adalah di Provinsi Bali, yaitu dengan mengumpulkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dan dari instansi lain yang terkait dengan penelitian ini. Objek penelitian adalah suatu sifat dari obyek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian memperoleh kesimpulan (Sugiyono, 2013: 38). Objek penelitian ini adalah PAD, pendidikan, pengangguran dan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali.

Variabel terikat (*Dependent Variable*), yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel yang mengalami perubahan akibat pengaruh variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah kemiskinan (Y). Kemiskinan (Y) dari kondisi seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam penelitian ini kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan yang terjadi di Provinsi Bali dari tahun 2001-2015 yang dinyatakan dengan satuan ribu jiwa.

Variabel bebas (*Independent Variable*), yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah PAD

( $X_1$ ), pendidikan ( $X_2$ ), dan pengangguran ( $X_3$ ). Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini PAD yang dimaksud adalah PAD Provinsi Bali dari tahun 2001-2015 yang dinyatakan dengan satuan ribu rupiah.

Pendidikan ( $X_2$ ) adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Dalam penelitian ini pendidikan dilihat dari angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas di Provinsi Bali Tahun 2001-2015 yang dinyatakan dalam persentase.

Pengangguran ( $X_3$ ) adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Dalam penelitian ini pengangguran yang digunakan adalah data pengangguran di Provinsi Bali dari tahun 2001-2015 yang dinyatakan dalam persentase.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka dan dihitung dengan satuan hitung (Sugiyono, 2013). Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data PAD, pendidikan, jumlah pengangguran dan kemiskinan, sedangkan data kualitatifnya terdiri dari penjelasan mengenai informasi-informasi terkait dengan penelitian.

Berdasarkan sumbernya jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mengenai PAD, angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas, tingkat pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Bali yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi kasus, yaitu suatu metode pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif, rinci dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Dalam studi kasus observasi, teknik pengumpulan datanya melalui observasi peran-serta atau pelibatan (*participant observation*), sedangkan fokus studinya pada suatu organisasi tertentu dalam penelitian ini adalah kemiskinan di Provinsi Bali.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan, dalam penelitian ini bentuk umumnya adalah sebagai berikut ini.

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \mu_i \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- $Y_i$  = Kemiskinan
- $X_1$  = PAD
- $X_2$  = Pendidikan
- $X_3$  = Pengangguran
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = koefisien Regresi

$\beta_0$  = konstanta/ intersep  
 $\mu_i$  = pengganggu

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali. Provinsi Bali merupakan salah satu dari 33 provinsi yang ada di Indonesia dan terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok dengan posisi pada  $08^{\circ}03'40''$  –  $08^{\circ}50'48''$  lintang selatan dan  $114^{\circ}25'53''$  –  $115^{\circ}42'40''$  bujur timur. Provinsi Bali terdiri dari beberapa pulau, yaitu pulau Bali yang merupakan pulau terbesar, sedangkan pulau – pulau kecil lainnya adalah Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan dan Pulau Menjangan. Luas wilayah Bali secara keseluruhan  $5.632,86 \text{ Km}^2$  atau  $0,29 \text{ Km}^2$  dari luas kepulauan Indonesia. Secara administratif Provinsi Bali dibagi menjadi 9 Kabupaten / Kota (8 Kabupaten dan 1 Kota), 55 Kecamatan, 692 Desa atau Kelurahan, 1.418 Desa Adat dan 3.945 Banjar/adat. Daerah Bali juga dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian yang membujur dari daerah barat ke timur. Masing – masing daerah yang terletak di setiap bagian tersebut memiliki potensi alam yang berbeda yang memungkinkan dihasilkannya hasil alam yang beraneka ragam serta berpotensi sebagai komoditi.

Analisis regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel PAD ( $X_1$ ), pendidikan ( $X_2$ ), dan pengangguran ( $X_3$ ) terhadap kemiskinan di Provinsi Bali ( $Y$ ) dengan menggunakan *SPSS.22*. Hasil analisis akan ditunjukkan pada Tabel 5.

**Tabel 5 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	2,731	3,313		0,824	0,427
PAD	-0,095	0,135	-0,588	-1,903	0,010
Pendidikan	-0,215	2,190	-0,055	-2,098	0,003
Pengangguran	0,071	0,170	0,215	2,416	0,000
R Square	0,629				
F hitung	4,116				
Signifikansi F	0,001				

Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2016

Hasil analisis menunjukkan persamaan model regresi variabel terikat dan bebas adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 2,731 - 0,095X_1 - 0,215X_2 + 0,071X_3$$

$$Se = (3,313) (0,135) (2,190) (0,170)$$

$$t = (0,824) (-1,903) (-2,098) (2,416)$$

$$Sig = (0,427) (0,010) (0,003) (0,000)$$

$$R^2 = 0,629$$

$$F = 4,116 \quad \text{nilai Sig. } F = 0,001$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut maka dapat diuraikan koefisien regresi variabel PAD ( $X_1$ ) terhadap kemiskinan ( $Y$ ) sebesar -0,095 memiliki arti bahwa jika PAD meningkat sebesar 1 ribu rupiah maka kemiskinan akan menurun sebesar 95 orang dengan asumsi pendidikan dan pengangguran konstan. Koefisien regresi variabel pendidikan ( $X_2$ ) terhadap kemiskinan ( $Y$ ) sebesar -0,215 memiliki arti bahwa apabila pendidikan (rata-rata lama sekolah) meningkat 1 persen maka kemiskinan akan menurun sebesar 215 orang dengan asumsi variabel pengangguran dan PAD konstan. Koefisien regresi variabel pengangguran ( $X_3$ ) terhadap kemiskinan ( $Y$ ) sebesar 0,071 memiliki arti bahwa jika pengangguran meningkat sebesar 1 orang maka kemiskinan akan meningkat sebesar 71 orang dengan asumsi variabel pendidikan dan PAD konstan.

Teknik analisis regresi linier berganda memerlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari empat, diantaranya adalah uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji residual dari model regresi yang dibuat apakah berdistribusi normal atau tidak (Suyana Utama, 2009). Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Terpenuhi atau tidaknya uji normalitas dapat diuji dengan melakukan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) yang dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6 Hasil Uji Normalitas**

	<b>Unstandardized Residual</b>
N	15
Test Statistic	0,155
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200 <sup>c,d</sup>

*Sumber:* Hasil Olahan SPSS, 2016

Besarnya nilai Test Statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) adalah 0,155 dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Nilai tersebut menyatakan bahwa data berdistribusi normal, karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  persen. Menurut Suyana Utama (2009:92), uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui korelasi autokorelasi atau pengaruh data di dalam model regresi. Autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian observasi residual yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data deretan waktu) atau ruang (seperti dalam data *cross sectional*). Untuk melacak adanya autokorelasi atau pengaruh data dari pengamatan sebelumnya dalam model regresi dilakukan uji autokorelasi. Jika nilai Durbin watson  $> DU < 4-DU$ , berarti bahwa model yang dibuat tidak terjadi autokolerasi.

**Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.739 <sup>a</sup>	.546	.422	.04678	2.476

Sumber: Hasil olahan SPSS, 2016

Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 2,476, berdasarkan nilai signifikansi 0,05 dengan N=15 dan jumlah variabel independen 3 (K=3), maka diperoleh nilai DU sebesar 1,465. Oleh karena nilai DW sebesar 2,476 lebih besar dari nilai DU sebesar 1,465 dan lebih kecil dari 4-DU ( $4-1,465=2,535$ ), artinya tidak terjadi gejala autokorelasi antara variabel PAD, pendidikan dan pengangguran.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas atau bebas dari gejala multikolinieritas. Untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi antar variabel bebas dapat dilihat dari nilai *tolerance* atau nilai *variance inflation factor* (VIF). Hasil uji multikolinieritas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8.

**Tabel 8 Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD	0.659	1.947
Pendidikan	0.630	2.681
Pengangguran	0.954	1.476

Sumber: Hasil olahan SPSS, 2016

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 10 persen (0,1) dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga model dikatakan tidak mengandung gejala multikolinieritas.

Menurut Suyana Utama (2009:94), uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain di model regresinya. Jika varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *glejser*. Jika nilai signifikansinya berada di atas 0,05 maka model regresi ini dapat dikatakan bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada Tabel 9.

**Tabel 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Sig.
PAD	0.100
Pendidikan	0.130
Pengangguran	0.467

Sumber: Hasil olahan SPSS, 2016

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai sig. dari masing-masing variabel independen adalah di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen tersebut bebas dari heteroskedastisitas.

Hasil analisis uji statistik dengan menggunakan program *SPSS*. 22 diperoleh nilai  $F$  hitung sebesar  $4,116 > F$  tabel sebesar 3,59 dan signifikan  $F$  hitung sebesar  $0,001 < \alpha = 5$  persen maka  $H_0$  di tolak dan  $H_1$  diterima, yang artinya PAD, pendidikan dan pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Hasil ini didukung oleh nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,629 yang memiliki arti bahwa 62,9 persen variasi dari kemiskinan di Provinsi Bali dijelaskan oleh PAD, pendidikan dan pengangguran, sedangkan

37,1 persen sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Berdasarkan nilai  $t$  hitung sebesar  $-1,903$  lebih kecil dari  $t$  tabel  $-1,796$  dan nilai signifikan sebesar  $0,01 < \alpha = 0,05$  maka  $H_1$  diterima yang berarti bahwa PAD secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Artinya, ketika PAD di suatu daerah mengalami peningkatan maka kemiskinan akan mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Hubungan Teori Hipotesis Kuznet. Kuznet (2001), PAD dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Menurut penelitian Hermanto dan Dwi (2007) menyatakan bahwa ketika perekonomian berkembang di suatu wilayah (negara atau kawasan tertentu yang lebih kecil) yang terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan dan memiliki distribusi pendapatan dengan baik di antara wilayah tersebut, maka akan dapat mengurangi kemiskinan. Hasil penelitian ini juga didukung hasil penelitian Santosa (2013) yang menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan daerah.

Berdasarkan nilai  $t$  hitung sebesar  $-2,098$  lebih kecil dari  $t$  tabel  $-1,796$  dan nilai signifikan  $t$  sebesar  $0,003 < \alpha = 0,05$  maka  $H_2$  diterima yang berarti bahwa variabel pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Artinya, ketika tingkat pendidikan masyarakat di

suatu daerah mengalami peningkatan maka tingkat kemiskinan di daerah tersebut akan mengalami penurunan.

Hasil ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Sadoulet dalam Kokila (2000) yang menyatakan bahwa pendidikan mengurangi ketimpangan dan kemiskinan secara langsung, yaitu dengan meningkatkan produktivitas bagi golongan miskin, memperbaiki kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang lebih baik, dan membuka jalur hubungan vertikal bagi anak-anak mereka. Secara tidak langsung, pendidikan memberikan kemampuan yang lebih bagi golongan miskin untuk memperoleh bagian mereka dari total pendapatan.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sikander (2014) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pola hubungan yang terjadi adalah negatif yang artinya meningkatnya tingkat pendidikan akan mengurangi angka kemiskinan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian Aref (2011), Rahmawati (2006), dan Janjua (2011), yang menyatakan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.

Berdasarkan nilai  $t$  hitung sebesar 2,416 lebih besar dari  $t$  tabel 1,796 dan nilai signifikan  $t$  sebesar  $0,000 < \alpha = 0,05$  maka  $H_3$  diterima yang berarti bahwa variabel pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Artinya, semakin tinggi tingkat pengangguran di Provinsi Bali maka tingkat kemiskinan akan semakin meningkat.

Menurut Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan dalam jangka panjang. Arsyad (1997) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Permana dan Arianti (2012) penelitiannya juga menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh langsung dan signifikan berdampak pada kemiskinan. Sumber utama kemiskinan adalah pengangguran. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu daerah sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian Cholili (2014) dan Yarhim Yacoub (2013) yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Lebih lanjut Seran (2017) juga menemukan bahwa pengangguran dengan kemiskinan memiliki hubungan langsung yang bersifat positif dan signifikan. Selanjutnya dari hasil analisis data mendukung dari penelitian sebelumnya. Sehingga temuan-temuan yang diperoleh bahwa dengan tingkat pengangguran yang tinggi akan meningkatkan penduduk yang miskin.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel PAD, pendidikan dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Secara parsial PAD, dan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Sementara itu, secara parsial pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan dari hasil analisis adalah alokasi pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi sangat berperan dalam pengurangan kemiskinan, oleh karena itu Provinsi Bali agar lebih meningkatkan alokasi pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bagi Dinas Pendidikan sebaiknya tidak hanya memusatkan perhatian pada pendidikan formal saja, karena pendidikan nonformal juga mampu memberikan tenaga kerja yang produktif sehingga bantuan yang diberikan pemerintah sebaiknya sebagian digunakan untuk pengembangan pendidikan nonformal, seperti mendirikan tempat yang terbuka untuk umum yang bermanfaat memberikan pelatihan kreativitas (menjahit, menyablon, dll), khususnya bagi anak jalanan.

Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari

tingkat akses terhadap kekuasaan yang mempunyai pengertian tentang sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Secara sosial psikologi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Bali perlu memberi perhatian yang lebih terkait kemiskinan di Provinsi Bali. Sinerginya informasi dan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan hasil yang diharapkan dapat mengurangi kemiskinan, salah satunya dengan membuka program kerja padat karya berbasis tenaga kerja dan memberi pelatihan kerja di sektor informal dan pengembangan UMKM.

## REFERENSI

- Abrisham Aref. 2011. Perceived Impact of Education on Poverty Reduction in Rural Areas of Iran, *Life Science Jurnal*, 8 (2), 198-199.
- Akwara Azalahu F dan Akwara Ngozi F. 2013. Unemployment and Poverty: Implications for National Security and Good Governance in Nigeria, *International Jurnal of Public Administration and Menegement Research (IIPAMR)*, Vol.2(1), hal:2-3.
- Algis Sileika dan Jurgita Bakeryte. 2013. Theoretical Issues of Relationship Between Unemployment Poverty and Crime in Sustainable Development, *Jurnal of Security and Sustainability Issues*. Vol 2 (3) hal: 64-65.
- Arinti.2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Tidak Langsung terhadap Kemiskinan melalui Belanja Tidak Langsung di Provinsi Bali, *E-Jurnal EP Unud*.4(9) h: 1144-1146.
- Ashcroft, Vincent & David Cavanough. 2008. Survey of Recent Developments. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 44(3), pp: 335-363.

- Astrini, Ni Made Myanti dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja. 2013. Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(8), pp: 384-392.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2015. *Bali Dalam Angka*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- BAPEDA Provinsi Bali. 2014. *Data Bali Membangun*. Denpasar.
- Budi Santosa. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 5(2), hal: 134-135.
- Dariwardani, Ni Made Inna. 2014. Analisis Dinamika Kemiskinan (*Poverty Dynamics*) di Bali Berdasarkan Data Susenas Panel 2008 – 2010. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan (JEKT)*. 7(1): h: 7-15.
- Iswara, I Made Anom dan I Gusti Bagus Indrajaya. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali Tahun 2006 – 2011. *E-Jurnal EP Unud*, 3(11), h: 492-501.
- Ketut Nehen. 2016. *Perekonomian Indonesia*. Denpasar: Udayana Universitas Press.
- Mankiw. 2012. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Erlangga.
- Panji, I Putu Barat dan I Gusti Bagus Indrajaya. 2016. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 5(3), h: 316 – 337.
- Pervez Zammurad Janjua. 2011. The Role of Education and Income in Poverty Alleviation: Across- Country Analysis, *The Lahore Journal of Economic*, 16 (1), hal: 150-151.
- Pratomo, Devanto Shasta. 2017. Pendidikan dan Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Indonesia: Analisis Terhadap Hipotesis Kurva-U. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan (JEKT)*. 10(1): h: 1-7.
- Putri, I. A. P. Septyana Mega dan Ni Nyoman Yuliarmi. 2013. Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Universitas Udayana*, 2(10), pp: 441-448.

- Rahmawati. 2006. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Pacita Provinsi Jawa Timur. *Skripsi Program Studi Pertanian dan Sumberdaya, Fakultas Pertanian, IPB, Bogor.*
- Senet, D., dan Nyoman Yuliarmi. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Pengangguran di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP UNUD*, 3(6) : 237:246.
- Seran, Sirilius. 2017. Hubungan Antara Pendidikan, pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan (JEKT)*. 10(1): h: 59-71.
- Sikander Pervez. 2014. Impact of Education on Poverty Reduction: A Co-integration Analysis for Pakistan, *Jurnal of Research in Economich and Internasional Finance*, Vol.3(4) hal: 84-85.
- Silva, Indunil De and Sudarno Sumarto. 2014. Does Economic Growth Really Benefit the Poor? Income Distribution Dynamics and Pro-poor Growth in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50 (2):227-42.
- Sirait, Novi dan A. A. I. N. Marhaeni. 2013. Analisis Beberapa Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Jumlah Pengangguran Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Universitas Udayana*, 2(2).
- Sri Budhi, Made Kembar. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kemiskinan di bali: Aanlisis FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan (JEKT)*. 6(1): h: 1-6.
- Sudewi, Ni Nyoman Ayu dan I. G. A, Putu Wirathi. 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Universitas Udayana*, 2(3).
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartini, Atik Mar'atis. 2014. Keterkaitan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan (JEKT)*. 7(2): h: 137-144.
- Sukirno Sadono. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada.
- Suputra, I Putu Eka dan Ni Putu Martini Dewi. 2016. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Struktur Ekonomi Dan Belanja Pembangunan Terhadap Kemiskinan Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4(2), h: 105 – 112.

- Suwandika, P., dan Nyoman Mahaendra Yasa. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Di Provinsi Bali. *Jurnal EP Unud*, 4 (7), h:794-810.
- Tadoro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia ketiga*, Edisi ketujuh, Terjemah Haris Munandar. Jakarta: Erlangga.
- Tulus H Tambunan. 2001. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Wijayanti , Ni Kadek HERNI dan Ida Bagus Darsana. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal EP Unud*, 4(3), h: 1164-1193.
- Yarlina Yacoub. 2012, Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal EKSOS*, 8(3) hal 177-178.
- Yusuf, Arief Anshory & Andy Summer. 2015. Growth, Poverty, and Inequality under Jokowi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51 (3):323–48.